

# “Ekonomi Politik Media Dalam Pemberitaan Kasus Korupsi”

Yunilia Edon

Faculty of political and Journalistic Communication

Postgraduate Student of Universitas Persada Indonesia Y.A.I, Jl. Pangeran Diponegoro No.74

Kenari, Jakarta Pusat

Email : *Liaschan03@gmail.com*

## ABSTRAK :

Setiap media massa ada bentuk ideologinya, yang kemudian dianut oleh para wartawan di media masa tersebut, dan dijadikan pedoman dalam menulis di media massa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk ideologi hukum yang dianut wartawan majalah KEADILAN, dan untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur kekuasaan dalam penulisan tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis dengan metode analisis wacana kritis (AWK). Sumber penelitian ini adalah empat buah teks wacana berita tentang hukum dalam majalah KEADILAN edisi Mei 2018. Sedangkan data penelitian ini berupa frase, kosakata, atau kalimat-kalimat yang dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut : mentranskripsikan data dari dokumen (teks berita), mengelompokkan/ mengklasifikasikan kata, frase, atau kalimat, serta gambar latar kondisi kasus yang diangkat dalam pemberitaan yang mengandung ideologi hukum, menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberitaan kasus hukum mengandung ideologi hukum yang lebih berpihak kepada rakyat dan keadilan, serta tidak mengandung karakteristik kekuasaan dalam pemberitaannya. Ketajaman, kekritisman wartawan dalam menyoroiti permasalahan dalam pemberitaannya hanya sebagai bentuk identitas diri dari majalah yang tidak memiliki afiliasi terhadap pemerintah. Ideologi wartawan tampak dari cara pemilihan kosa kata, frase, kalimat, dan pengutipan-pengutipan yang memunculkan partisipan dalam pemberitaan, serta bukti surat-surat edaran yang terbukti sebagai pelanggaran yang dibuat dan coba dimunculkan dalam pemberitaan.

**Kata Kunci :** *Analisis Wacana Kritis (AWK), Berita Hukum, Kasus Korupsi, Komunikasi Massa, Media Cetak, Analisis Teks*

## ABSTRACT

*Every mass media is a form of ideology, which is then embraced by journalists in the mass media, and used in the mass media. The purpose of this research is to find out the uniqueness of the law embraced by the Javanese magazine, and to determine whether or not something is wrong in the memory. The approach in this research is paradigm with critical discourse analysis approach (AWK). The source of this study is four texts on news about the law in the May 2018 edition of the Journal of Justice. While the research data is in the form of phrases, vocabulary, or sentences analyzed with the following steps: transcribing data from documents (news text), grouping/ Classifying words, phrases, or words, and background images of key words raised in a context containing legal ideology, draw conclusions. Data processing techniques using documentation techniques. The results of this study indicate that in legal cases contains legal ideology that is more pro-people and justice, and does not produce strength in the news. Sharpness, criticality of managers in issues in their reporting is only a form of reporting that has no affiliation to the government. The manager's ideology can be seen from the way of choosing words, phrases, sentences, and quotations that give rise to participation in the news, and evidence of circulars which are proven to be crimes made and used in the news.*

**Keywords :** *Keywords: Critical Discourse Analysis (AWK), Law News, Corruption Cases, Mass Communication, Print Media, Text Analysis*

## PENDAHULUAN

Wacana adalah istilah yang sering dipakai oleh masyarakat dewasa ini. Terdapat sejumlah pengertian tentang istilah wacana. Dalam bidang sosiologi, wacana menunjuk terutama dalam hubungan konteks sosial dari pemakaian Bahasa. Dalam bidang linguistik, wacana adalah unit Bahasa yang lebih besar daripada kalimat.

Terdapat tiga hal sentral dalam kaitannya dengan pengertian wacana, yaitu teks, konteks, dan wacana. Eriyanto (2001) kemudian menjelaskan ketiga makna tersebut sebagai berikut. Teks adalah semua bentuk Bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian Bahasa, seperti partisipan dalam Bahasa, situasi dimana teks tersebut diproduksi. Wacana di sini di maknai sebagai teks dan konteks secara bersama-sama.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa teks memiliki peranan yang signifikan dalam pembentukan wacana. Menurut Hamad, benar bahwa unsur utama dalam konstruksi realitas adalah Bahasa (teks). Dia mengutip dari Giles dan wieman bahwa Bahasa (teks) mampu menentukan konteks, karena lewat Bahasa seseorang mencoba mempengaruhi orang lain (menunjukkan kekuasaannya) melalui pemilihan kata yang secara efektif mampu memanipulasi konteks.

Lebih lanjut Eriyanto (2001) menjelaskan bahwa analisis wacana dalam studi linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal (yang lebih memperhatikan pada unit kata, frase, dan kalimat semata tanpa melihat keterkaitan di antara unsur tersebut). Analisis wacana adalah kebalikan dari linguistik formal, karena memusatkan perhatian pada level di atas kalimat, seperti hubungan gramatikal yang terbentuk pada level yang lebih besar dari kalimat. Analisis wacana pada bidang psikologi sosial diartikan sebagai pembicaraan. Wacana yang dimaksud mirip dengan struktur dan bentuk wawancara dan praktik pemakainya. Sementara dalam bidang politik, analisis wacana adalah praktik pemakaian Bahasa, terutama politik Bahasa, karena Bahasa adalah aspek sentral dari penggambaran suatu

subjek dan lewat Bahasa ideologi terserap di dalamnya.

Kekuasaan atau lebih khusus lagi kekuasaan sosial adalah kajian sentral dari wacana kritis. Kekuasaan sosial dapat didefinisikan dengan istilah control. Kekuasaan digunakan untuk mengontrol tindakan dan pikiran anggota kelompok tersebut, sehingga ini juga membutuhkan *power base* dalam bentuk seperti uang, *force*, status, popularitas, pengetahuan, informasi, budaya, atau yang terpenting “*Public Discourse*” dan komunikasi.

Kekuasaan atau power dibedakan pada sumberdaya yang menggunakannya, seperti contoh orang kaya selalu memiliki power karena uangnya yang banyak, professor memiliki power karena pengetahuannya, presiden memiliki power, dlsb. Power pada dasarnya tidak bersifat mutlak. Dan untuk power yang dimiliki oleh kelompok dominan biasanya terintegrasi dalam bentuk hukum, peraturan, norma kebiasaan, dan juga consensus atau disebut oleh Gramsci yaitu “Hegemony”. Dominasi kelas, seksisme, dan rasisme adalah contoh hegemoni. Di sisi lain juga, sebenarnya bahwa kekuasaan tidak selalu digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan, karena dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan tindakan yang dianggap benar. Demikian pula, tidak semua anggota kelompok yang berkuasa lebih powerful daripada anggota kelompok terdominasi, power disini dimiliki oleh semua kelompok. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas, power atau kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok dominan biasanya terintegrasi salah satunya hukum.

Majalah KEADILAN adalah majalah berita mingguan Indonesia yang umumnya meliputi berita dan politik. Edisi Pertama KEADILAN diterbitkan pada Maret 2016 yang merupakan majalah pertama yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah. Selama terbit sampai sekarang KEADILAN sudah beberapa kali pernah menuliskan laporan yang bersifat investigasi, antara lain pada tahun 2016 meliputi tentang kasus Asisten Umum Direktur Pertamina Ibnu Sutowo yaitu Alamarhum Haji Thahrir di Singapura yang meledak karena kasus megakorupsi Pertamina, pengadaan kapal AHTS Maloko dan Bahile, serta meliputi tentang denda keterlambatan penyerahan kapal AHT Celebes, dan meliputi pidato Ahmad Bambang saat penyerahan kapal Celebes. Peliputan investigative tampaknya mulai dipakai wartawan

secara serius sejak tahun 1990-an. Sejak reformasi bergulir tahun 1998, pelaporan investigatif banyak mendapat tempat dengan memberitakan kasus-kasus korupsi.

Wacana yang dikonstruksikan oleh wartawan majalah KEADILAN tidak sepenuhnya netral atau alami melaporkan berita tentang korupsi, dan pelanggaran-pelanggaran hukum, akan tetapi telah dipengaruhi oleh ide-ide atau sudut pandang penulis teks (wartawan) dalam menyingkapi peristiwa yang dikonstruksikan di dalam pemberitaannya. Sehingga terjadi pro dan kontra pemahaman khalayak terhadap pemberitaan tersebut.

Pada dasarnya sebuah wacana berita media massa merupakan konstruksi dari realitas-realitas suatu peristiwa sampai membentuk sebuah wacana yang bermakna. Ibnu Hamad (2004) mengungkapkan bahwa seluruh isi media merupakan realitas yang dikonstruksikan (*constructed reality*) dalam bentuk wacana yang bermakna. Oleh karena itu, adanya ideologi penulis teks (wartawan) dalam pemberitaannya juga mempengaruhi konstruksi yang akan terbentuk pada media tersebut.

Konstruksi pemberitaan dari suatu media erat kaitannya dengan ideologi media dan penulis media (wartawan) tersebut, sehingga pemberitaan-pemberitaan yang disajikan oleh wartawan pun sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, dan sudut pandangnya dalam merefleksikan suatu peristiwa ke dalam sebuah wacana yang bermakna. Selain itu ideologi yang diusung oleh media massa tersebut sangat berpengaruh terhadap penerbitan-penerbitan beritanya.

Bentuk-bentuk dari ideologi penulis teks (wartawan) yang terdapat di dalam teks berita media massa berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan, dan keberpihakan terhadap salah satu partisipan dalam pemberitaannya. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut.

Ideologi dalam suatu pemberitaan terkadang bisa muncul tanpa disadari oleh penulis teks. Hal itu disebabkan karena pemahaman khalayak tentang berita itu yang beragam. Ideologi merupakan cara berpikir seseorang atau suatu golongan; kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup (Ananda Santoso, A.R. Al Hanif dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia). Konsep ideologi ini dijelaskan lebih lanjut oleh Raymond

Williams (Televisi, 2015) tentang tiga penggunaan utama dari ideologi, yaitu : (1) Sebuah sistem karakteristik kepercayaan dari suatu kelas atau kelompok tertentu, (2) Sebuah sistem kepercayaan palsu-ide atau kesadaran palsu-yang dapat dikontraskan dengan kebenaran atau pengetahuan ilmiah, dan (3) proses umum produksi makna dan ide. Untuk mengkaji ideologi yang terdapat di dalam majalah KEADILAN edisi Mei 2018, maka digunakan analisis wacana *Critical Discourse Analysis* (CDA) Ruth Wodak dan Michael Meyer sebagai metodenya.

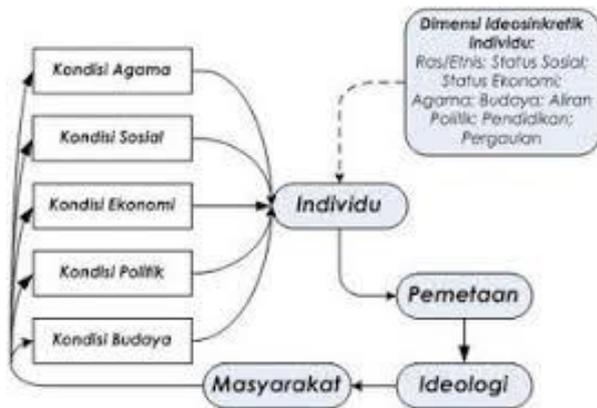
Ideologi, dikatakan Aiken (dalam Ali, 2003), sebagai sistem ide-ide tentang fenomena kehidupan sosial, cara berpikir khas suatu kelas atau individu. Marx dan Engel mengembangkan makna ideologi bukan hanya terbatas pada teori tentang pengetahuan dan ide-ide politik, melainkan juga menyangkut masalah metafisika, etika, agama, dan segala bentuk kesadaran masyarakat.

Ideologi merupakan cara berpikir seseorang atau suatu golongan; kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Raymond Williams menjelaskan lebih lanjut tentang tiga batasan utama dari ideologi, yaitu: (1). Sebuah sistem karakteristik kepercayaan dari suatu kelas atau kelompok tertentu, (2) Sebuah sistem kepercayaan palsu-ide atau kesadaran palsu-yang dapat dikontraskan dengan kebenaran atau pengetahuan ilmiah, dan (3) proses umum produksi makna dan ide.

Ideologi yang pertama penggunaannya lebih mengacu pada psikologis atau bagaimana sikap di organisasi ke dalam pola yang koheren. Seperti yang diungkapkan oleh Brockreide (dalam Fiske, 1968) bahwa “rumah dari sikap adalah ideologi”. Untuk batasan penggunaan ideologi yang kedua lebih mengarah pada kategori ilusi dan kesadaran palsu, tempat di mana kelas penguasa memelihara dominasinya terhadap kelas pekerja. Sedangkan penggunaan ideologi yang ketiga digunakan untuk mendeskripsikan produksi sosial dari makna. Artinya, ideologi yang ketiga ini dipandang bukan hanya seperangkat nilai yang statis dan juga bukan cara pandang, melainkan sebuah praktik.

Ideologi adalah sebuah jalan untuk melakukan pemaknaan (membuat sesuatu masuk akal). Makna yang dibuat selalu memiliki dimensi social dan politik. Ideologi di dalam cara pandang ini merupakan sebuah praktik/ tindakan sosial.

Ideologi dapat diartikan juga sebagai pemetaan realitas sosial oleh individu yang digunakan untuk menggerakkan kelompok atau masyarakat guna



mengubah kondisi nyata seperti apa yang dinyatakan di dalam muatan ideologi. Seperti digambarkan peta pengertian ideologi berikut ini.

**Gambar 1. Pemetaan Ideologi**

Terdapat kondisi nyata seputar agama, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kondisi-kondisi tersebut (seluruhnya atau beberapa) diserap oleh individu. Individu yang memperhatikan ini memiliki dimensi ideosinkretik latar belakang ras/etnik, status social, status ekonomi, agama, budaya, aliran politik, pendidikan, dan pergaulan tertentu. Dimensi ideosinkretik ini mempengaruhi pemetaan yang ia lakukan terhadap kondisi-kondisi nyata tersebut. Pemetaan hasil pemikiran individu tersebut melahirkan apa yang disebut ideologi. Lalu, ideologi ini disebarkan si individu, terutama kepada kelompok dan masyarakat yang mendukung atau berpotensi untuk digerakkan oleh ideology tersebut. Ideologi ini digunakan untuk mengubah kondisi nyata tujuan dari ideologi yang bersangkutan.

Ideologi muncul karena adanya kekuasaan. Kekuasaan social didasarkan pada hak akses terhadap sumber-sumber yang bernilai sosial, seperti kekayaan, penghasilan, posisi/jabatan, dan status social, termasuk akses terhadap berbagai diskursi (wacana), yang merupakan sumber kekuasaan yang penting. Kekuasaan juga berdimensi kognitif artinya selain mengontrol aksi, juga membatasi kebebasan bertindak dari kelompok yang terdominasi, tetapi juga mempengaruhi jalan pikirannya.

Hal yang terpenting bahwa kekuasaan yang lebih modern dan cenderung efektif, kebanyakan bersifat kognitif, yang dicapai di antaranya melalui

persuasi dan manipulasi. Termasuk memanipulasi kebenaran yang ada di dalam sebuah wacana. Untuk itu diperlukan “akal sehat” untuk memahami kebenaran sebuah wacana. Seperti yang diungkapkan oleh Raymond William tentang batasan utama ideology pada point dua, yaitu tentang kesadaran palsu. Kesadaran kita ditentukan oleh masyarakat dimana dilahirkan, tidak oleh kondisi alamiah kita atau psikologi individual.

Jadi salah satu bentuk adanya kekuasaan dari penulis di era modern yang cenderung efektif bersifat kognitif, yang dicapainya melalui persuasi dan manipulasi. Independensi merupakan salah satu bentuk idiologi penulis untuk mempersuaf khalayak terhadap ide/gagasan yang ingin disampaikan penulis.

Di majalah KEADILAN Edisi 23 tanggal 14-27 Mei 2018 terdapat berita mengenai Mantan Wakil Dirut Pertamina Ahmad Bambang dengan judul “Cincai-cincai ala Ahmad Bambang” yang intinya tentang pelanggaran yang dilakukan adalah mengenai pelanggaran spek proyek pengadaan kapal yang tak sesuai kontrak yang dibuat VMS dengan PTK di era Wakil Dirut Pertamina sebelum Ahmad Bambang yaitu Suhermanto dan mengenai hilangnya denda keterlambatan penyerahan kapal Andalas dan AHTS Celebes yang merugikan negara sebanyak 14 juta dollar AS (Rp196 Miliar) pengadaan kapal Maloko dan Balihe. Di dalam berita tersebut penulis secara “gamblang” menjelaskan tentang pelanggaran yang berujung pada kerugian negara sebanyak 14 juta dollar AS (Rp196 Miliar) dan proyek pengadaan kapal Maloko dan Balihe membuat kerugian negara sekitar 28 juta dollar AS (Rp 392 Miliar). Bahkan dalam peristiwa pelanggaran tersebut turut campur tangan penegak hukum atau Jaksa Agung yang seyogyanya sebagai penegak keadilan dan penegak kebenaran. Seperti dalam kutipan berikut :

- (1) Penyidik itu terlihat berjalan agak cepat menuju temannya sesama penyidik, “Lihat Bro...., untung dia tidak kita jadikan tersangka. Jika tidak, kita bakal tidak akan selamat Bro...,” ujar penyidik tersebut sambil memperlihatkan berita dan foto pada telepon genggam berteknologi android miliknya.

Cerita ini diperoleh majalah KEADILAN dari seseorang yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. “Dia” yang dimaksud penyidik itu adalah Amad Bambang. Ahamad Bambang adalah mantan Wakil Direktur PT Pettamina yang kini menjadi Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan

Sarana Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam kutipan tersebut tergambar bagaimana sosok kedua penyidik dari tim kejaksaan tersebut yang *notabene* seharusnya memposisikan diri sebagai pengak hukum dan penegak kebenaran dan seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, namun mereka malah “takut” terhadap Ahmad Bambang kalau-kalau ia mengadukan hal tersebut kepada atasan mereka dan mereka terancam dipecat.

Dari kutipan di atas dapat dilihat tindakan yang diambil kedua orang tim penyidik tersebut adalah wajar dan alami. Hal itu yang coba dibangun penulis majalah terhadap pembacanya dalam menginterpretasikan peristiwa yang ada bahwa mereka (Penyidik, Jaksa Agung, dan Pejabat) adalah sosok individu manusia yang dapat dikenai sanksi atau hukuman jikalau tidak melaksanakan tugas dengan baik. Hal inilah yang disebut sebagai kesadaran palsu karena menyangkal makna yang “Benar” oleh sifat dasar penyidik, jaksa agung, dan pejabat.

Kemudian ada juga kutipan dalam majalah KEADILAN edisi 23 tanggal 17-24 Mei 2018 dengan tulisan si penulis seperti ini:

- (2) “Setidaknya itu dikatakan Jaksa Agung HM Prasetyo saat dikonfirmasi Jumat 27 April 2018 silam. Saat ditanya lebih jauh soal penghapusan denda, ia malah marah. “Kamu aja yang jadi jaksa”, sergahnya.

Dalam kutipan di atas diketahui bahwa Jaksa Agung, Pejabat dan Aparat Kepolisian adalah profesi yang harusnya mengutamakan kepentingan rakyat, tapi dalam hal ini tidak. Mereka cenderung takut dengan orang yang mempunyai kekuasaan sehingga mereka terancam kelangsungan profesinya. Hal ini menambah pemahaman “*blacklist*” yang sudah ada sebelumnya di masyarakat bahwa profesi-profesi seperti mereka adalah profesi yang tidak jauh dari “suap”. Dan ternyata dalam kasus ini terbukti. Selain itu ada hal yang esensial dari berita tersebut jika diinterpretasikan secara benar bahwa penulis bukan hanya memaparkan tentang kasus Megakorupsi yang dilakukan pihak Pertamina Trans Kontinental, tetapi juga lebih mengandung makna secara implisit bahwa kinerja pemerintah yang terkesan lamban dalam menangani kasus korupsi di tubuh Pertamina, yang ternyata sudah ada kasusnya dari semenjak jaman pemerintahan Soeharto.

Dari rangkaian kalimat kutipan di atas, terlihat penulis berusaha mempersuaf pembaca melalui sudut pandangnya dalam menyingkapi permasalahan tersebut.

Selain batasan tentang ideologi di atas, Antonio Gramsci, memperkenalkan ideologi *hegemony* melibatkan dan menenangkan kembali persetujuan dari mayoritas terhadap sistem yang menundukkan mereka. Dua elemen dari Gramsci yang lebih ditekankan oleh Mark atau Althusser adalah resistensi dan ketidakstabilan. Salah satu strategi kunci dari hegemoni adalah konstruksi “akal sehat”. Jika pemikiran-pemikiran dari kelas penguasa dapat diterima sebagai hal yang masuk akal (tidak ada tendensi kelas), kemudian objek ideologis dari mereka tercapai dan kerja ideologis mereka tertutupi. Contoh dari “akal sehat” adalah di dalam masyarakat kita kriminal adalah individu-individu yang aneh dan menyimpang yang perlu hukuman atau koreksi. Cara berpikir seperti itu menutupi kenyataan bahwa pelanggar hukum adalah orang-orang yang ke luar dari proposi masyarakat karena berasal dari kelompok sosial yang lemah atau terpinggirkan, mereka berasal dari ras, kelas, atau umur yang salah (tindak dominan).

Jadi, cara berpikir yang masuk akal membuat mereka bisa berpartisipasi pada logika masuk akal sehingga penyebab kriminalitas pencurian uang negara atau korupsi lebih bersifat sosial dibandingkan faktor individual. Sedangkan warga negara yang “patuh hukum”, yang secara umum dan kebetulan berasal dari kelas-kelas yang memiliki banyak kesempatan untuk mengakses alat-alat yang mendukung kesuksesan secara sosial, mereka terbebas dari tanggung jawab untuk berpikir bahwa kriminalitas mungkin merupakan produk dari sebuah sistem yang memberikan mereka banyak sekali keuntungan, dan solusi dari masalah tersebut mungkin melibatkan kemauan mereka untuk memberikan sebagian dari keistimewaan (perlakuan istimewa) yang mereka miliki. Cara berpikir yang lebih mengarah bahwa kriminalitas adalah sebuah konsekuensi dari individu yang menyimpang bukan sebagai akibat dari ketidakadilan dalam masyarakat adalah bagian dari ideologi borjuis, dan sejauh cara berpikir tersebut diterima oleh kelompok yang di dominasi (dan bahkan oleh kriminal itu sendiri, yang mungkin sangat percaya bahwa mereka layak untuk dihukum dan sistem pengadilan kriminal adalah adil bagi semua orang), hal ini adalah hegemoni

yang sedang bekerja. Persetujuan mereka terhadap kebijakan umum adalah kemenangan sementara dari hegemonik.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa teori Marx mengenai ideologi sebagai kesadaran palsu yang terkait erat dengan dasar ekonomi dari masyarakat dan mengajukan bahwa kesalahan pada kondisi material dari kelas bawahan akan membuat tidak terhindarkan untuk menghasilkan perlawanan terhadap tatanan sosial yang memproduksinya.

Ideologi juga merupakan sekelompok nilai unggul dan luhur yang dilepaskan oleh pencetusnya, kemudian diakui dan dinyatakan sebagai sebuah ideology dalam membimbing proses pemikiran dan tindakan manusia mengambil sebuah keputusan. Ideologi berfungsi sebagai motor penggerak dan roh sebuah perjuangan. System nilai ideal yang disebut ideology, oleh sementara orang diajarkan doktrin karena sifat sakral atau yang disakralkan, dipuja, dijadikan arah dan tujuan.

Ideologi dalam konteks media seperti yang diterjemahkan oleh para ahli, merupakan sistem makna yang membantu, menjelaskan dan mendefinisikan realitas dan membantu dalam membuat nilai-nilai pembenaran atas realitas tersebut. Ideologi juga menjadi suatu jalur atau keyakinan yang berdampak pada pesan-pesan yang seragam dalam suatu media. Pesan-pesan dalam suatu media akan mempresentasikan ideologi apa yang dianut oleh media tersebut. Salah satu bentuk ideologi penulis, yakni ideologi independensi. Ideologi-ideologi yang ada pada dikursif (wacana) suatu media massa dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan pembuat teks (wartawan) tersebut, dan kondisi material masyarakat, yaitu kondisi ekonomi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Ideologi secara umum memiliki dua pengertian yang berbeda. Pengertian dalam tataran positif menyatakan bahwa ideologi dipersepsikan sebagai realitas pandangan dunia (*world-view*, *weltanschauung*) yang menyatakan sistem nilai kelompok atau komunitas sosial tertentu untuk melegitimasi kepentingannya. Sementara itu, pengertian dalam tataran negatif menyatakan bahwa ideologi dipersepsikan sebagai realitas kesadaran palsu. Dalam arti, bahwa ideologi merupakan sarana manipulatif pemahaman manusia mengenai realitas social.

Ideologi mempunyai tiga ragam. Pertama, ideologi dalam arti penuh. Ragam ideologi dalam arti penuh bermakna bahwa ideologi merupakan ajaran seperti agama Islam garis keras, pandangan dunia (ideologi kiri seperti anarkisme, komunisme, sosialisme, serta ideologi kanan seperti liberalisme, konservatisme, dan fasisme), filsafat, sejarah yang memerlukan tujuan-tujuan dan norma social politik - yang diklaim sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh dipertanyakan lagi serta sekaligus sudah mapan dan harus dituruti secara penuh-paripurna, harus dijalankan dan ditaati oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Ideologi arti penuh berarti ideologi yang mempunyai status moral absolut dan menuntut ketaatan mutlak. Ragam ideologi tertutup ini diambil dari konsiderasi elit yang harus dipacu, dipropagandakan dan dipublikasikan.

Ragam kedua adalah ragam ideologi yang terbuka. Ideologi terbuka lebih merupakan cita-cita etika politik yang terbuka pada tindakan konkretnya. Justru cita-cita atau nilai tersebut menjamin kebebasan masyarakat untuk melaksanakan cita-cita tersebut. Dalam ideologi terbuka, cita-cita dilaksanakan tanpa ada paksaan. Ragam ketiga, ideologi implisit. Ideologi implisit adalah keyakinan atau sistem nilai hakekat realitas dan cara bertindak masyarakat yang tidak dirumuskan secara eksplisit. Meskipun implisit, ideologi tersebut diyakini dan diresapi dalam seluruh gaya hidup, merasa, berpikir bahkan bermasyarakat. Ideologi biasanya sulit untuk dibahasakan, namun tercermin dalam perbuatan seseorang atau kelompok begitupun dalam suatu media massa.

Kedua, ideologi sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*). Pengertian ideologi sebagai kesadaran palsu menyatakan bahwa ideologi merupakan system berpikir yang sudah terdistorsi, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Dalam pengertian ini, makna ideologi justru bernilai negatif. Artinya, ideologi merupakan suatu pandangan yang tidak wajar atau sebuah teori yang tidak berorientasi pada nilai kebenaran, melainkan sudah mengambil sikap berpihak pada kepentingan tertentu. Ketiga, ideologi sebagai sistem keyakinan yang tidak rasional. Artinya, bahwa ideologi merupakan hanya sekedar rangkaian sistem kepercayaan dan keyakinan subjektif (*belief system*). Konsekuensinya adalah ideologi tidak

membuka kemungkinan pertanggungjawaban rasional dan objektif.

## PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang di atas dapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi secara lengkap yang diusung dalam sebuah wacana tidak bersifat natural atau alami. Karena komunikasi yang tercipta dalam sebuah media massa telah mengandung maksud-maksud tersembunyi dari penulisnya. Dengan kata lain ada ideologi-ideologi tersembunyi yang diciptakan oleh penulisnya yang dilator belakangi oleh kekuasaan yang dominan dari media massa tersebut.

Berdasarkan paparan rumusan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu :

- (1) Bagaimana bentuk ideologi yang dianut oleh wartawan majalah KEADILAN?,
- (2) Ada atau tidaknya karakteristik yang mengandung unsur kekuasaan dalam wacana berita kasus hukum “Cincai-Cincai ala Ahmad Bambang di majalah KEADILAN edisi Mei 2018?

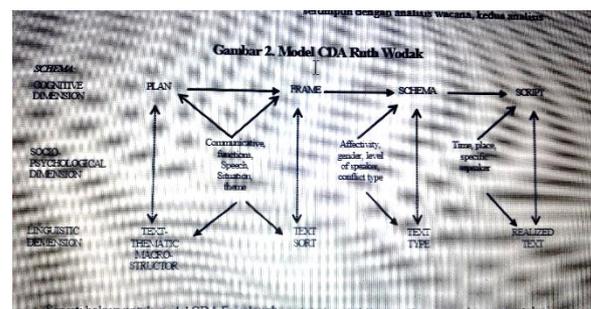
## METODOLOGI

Untuk dapat menjawab masalah penelitian mengenai ideologi yang ada pada penulis “Cincai-Cincai ala Ahmad Bambang” majalah KEADILAN, maka peneliti menggunakan analisis teks berupa analisis wacana kritis seperti yang dijabarkan oleh Ruth Wodak. Dalam analisis wacana, pertanggungjawaban ilmiahnya diseleraskan dengan metode penelitian yang berlaku pada kajian linguistik.

Adapun analisis wacana dalam bentuk wacana kritis (*critical discourse analysis/CDA*). Peneliti menganalisis wacana pada level naskah beserta sejarah dan konteks wacana tersebut, analisis wacana CDA memiliki dua model, yaitu CDA model Norman Fairclough yang melihat teks (naskah) dan CDA dari Ruth Wodak yang menilai teks (naskah) yang mempunyai sejarah. Peneliti menggunakan CDA Model Ruth Wodak. Dan menurut Wodak dalam Titscher ciri-ciri CDA memiliki karakter sebagai berikut :

1. *CDA is concerned with Social Problem*
2. *Power Relation have to do with Discourse*
3. *Society and Culture are dialectically related to discourse*
4. *Language use may be ideological*
5. *Discourse are historical and can only be understood in relation of their context*
6. *The connection between text and society is not direct, but is manifest through some intermediary such as the socio-cognitive one advanced in the socio-psychological model of text comprehension*
7. *Discourse analysis in interpretative and explanatory*
8. *Discourse is a form of social behaviour*

Jika kedelapan aspek di atas di lihat cukup mewakili bagian-bagian teks yang akan dianalisis, maka selanjutnya peneliti menyeleksi naskah-naskah yang akan dianalisis. Dari naskah-naskah yang diseleksi, terdapatlah dua buah naskah dalam satu majalah yang peneliti rasa tepat dengan teori analisis dari Ruth Wodak. Setelah membaca dua buah teks tadi penulis menemukan bahwa adanya kesinambungan sejarah yang terjadi tahun 2018 dengan sejarah yang terjadi pada saat pemerintahan Soeharto (1998). Dimana kala itu kasus Mega Korupsi yang dilakukan pihak Pertamina, juga rata-rata dilakukan oleh orang-orang Pertamina yang *notabene* adalah kesayangan Soeharto. Tulisan yang dimuat dalam majalah KEADILAN juga dipengaruhi oleh unsur kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan saat ini, dimana kekuasaan juga merupakan salah satu syarat sebagai dipenuhinya *Critical Discourse Analysis*.



**Gambar 2. Model CDA Ruth Wodak**

Model Ruth Wodak di atas ini, melihat naskah memiliki sejarah perjalanannya, sehingga ia dikenal juga dengan *Discourse-Historical Method*. Perjalanan tersebut bukan saja terjadi pada dimensi Bahasa, melainkan juga pada dimensi pemikiran si pembuat naskah. Keduanya dipengaruhi oleh

dimensi psikologis si pembuat naskah yang berinteraksi dengan situasi dan kondisi tersebut.

Seperti halnya CDA Fairlough, CDA Wodak juga hamper mirip, hanya saja agar kita dapat menangkap makna naskah dan sejarah perjalanan yang mempengaruhinya, kita perlu menggali data pada setiap dimensi. Model ini sekaligus memberi implikasi bahwa dalam memahami wacana (naskah/teks) kita tak dapat melepaskan dari konteksnya. Untuk menemukan “realitas” di balik teks kita memerlukan penelusuran atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek social psikologis yang mempengaruhi pembuatan teks.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan paradigma wacana kritis untuk melakukan penafsiran terhadap teks terutama teks berita dalam media massa. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis teks berita menggunakan metode analisis wacana kritis. Karena bahasa dalam media massa merupakan rekonstruksi dari penulis teks (wartawan). Untuk itu melalui analisis wacana kritis peneliti mencoba menelisik dan membedah lebih lanjut bagaimana bentuk ideologi hukum pada pemberitaan kasus hukum, kasus korupsi.

Data dalam penelitian ini akan dianalisis melalui beberapa tahapan dengan menggunakan model Miles and Huberman, dengan tiga tahapan yaitu (1) Level naskah, (2) Level produksi naskah, (3) Level konteks naskah, sebagaimana sesuai dengan teori analisis wacana dengan CDA (Ruth Wodak, 2012). Yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Peneliti memilih satu atau serangkaian naskah yang akan dianalisis. (2) Setelah dipilih, peneliti terlebih dahulu membaca dan mencermati teks berita hukum pada majalah KEADILAN Edisi Mei 2018. (3) Mengidentifikasi jenis ideologi yang dianut majalah KEADILAN pada pemberitan kasus hukum di ranah Pertamina berdasarkan analisis wacana kritis. (4) Kemudian dilakukan pengelompokan atau pengklasifikasian data berupa kosakata, frase, atau kalimat yang mengandung ideologi hukum. (5) Melakukan pembahasan dengan memakai teori wacana yang sejalan dengan metode analisis wacana kritis yang digunakan. (6) Menetapkan analisis wacana apa yang akan digunakan. Dalam hal ini peneliti menetapkan analisis wacana memakai CDA dari Ruth Wodak. (7) Menarik kesimpulan. Disini peneliti menafsirkan hasil analisis tersebut dengan teori hegemoni dengan cara berpikir paradigm

kritikal, kemudian menarik kesimpulan serta implikasi hasil analisis wacana tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian, diikuti dengan diskusi tentang pemahaman temuan penelitian dan perbandingan dengan teori dan / atau penelitian serupa. Untuk menghindari subjektivitas peneliti dalam menganalisis, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data terlebih dulu. Pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah menggunakan teknik *Triangulasi*

Teknik triangulasi adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Triangulasi meliputi triangulasi sumber, penyidik, teori, dan metode. Moleong (2009) mengungkapkan bahwa pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan cara uraian rinci, kecukupan refrensial, dan auditing.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data, yaitu dengan membandingkan pendapat dan pandangan dari peneliti yang memiliki bahasan yang sama dan memiliki pengetahuan tentang analisis wacana kritis. Tujuannya untuk mengetahui pendapat dan pandangan yang berbeda dari peneliti.

Peneliti mengambil sumber sebanyak dua orang yang memiliki latar belakang pengetahuan tentang analisis wacana kritis maupun yang memiliki kajian penelitian yang sama dan mensurvei siapakah yang paling cocok untuk dijadikan sumber data. Sumber yang pertama adalah seorang wartawan dari media cetak yang berbeda, namun sama-sama menulis tentang kasus korupsi, bernama Afakhar (45 tahun) dan sumber yang kedua adalah penulis (wartawan) itu sendiri yang menulis artikel “Cincai-cincai ala Ahmad Bambang” di majalah Keadilan, bernama Syamsul Mahmudin (48 tahun). Peneliti berasumsi bahwa jika minimal dua orang sumber memiliki kesamaan pendapat dengan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian yang ada memiliki tingkat keabsahan yang baik, setelah itu menghubungkan dengan teori analisis wacana yang ada. Sengaja peneliti mengambil sumber dari orang yang berbeda agar peneliti dapat mengetahui apakah ada persamaan pendapat sesuai dengan teknik triangulasi yang peneliti pakai?

Setelah semua hal di atas dilakukan maka peneliti melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap dua sumber tersebut dan

melakukan pendataan (list) tertulis kepada mereka. Setelah melakukan wawancara mendalam, ternyata peneliti menemukan bahwa ada kesamaan persamaan pendapat dalam hal yang melatarbelakangi kehidupan mereka sehingga tercipta ideologi mereka dalam tiap kali menulis di media cetak.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : (1) Yang terutama dalam pendekatan ekonomi politik media adalah produksi media yang ditentukan oleh pertukaran nilai isi media yang berbagai macam di bawah kondisi tekanan ekspansi pasar dan juga ditentukan oleh kepentingan ekonomi-politik pemilik modal dan pembuat kebijakan media. Memang, tidak ada

kepentingan kekuasaan disini, namun pemberitaan ini dimuat sebagai bentuk “sindiran” halus kepada si penguasa atau pemimpin di Pertamina. (2) Media yang seharusnya “netral” dan menyanjung objektivitas dalam setiap pemberitaan tetapi disini tidak, karena mengikuti kekuatan pasar dalam memainkan perannya. Semakin besar kekuatan pasar dalam memainkan perannya, akan semakin besar pula kebebasan konsumen (pembaca) untuk menentukan pilihannya. (3) Kebebasan media lebih merupakan rangkaian kontrol dan konsep kelas yang telah dibuat oleh elit dominan. (4) Wartawan merupakan bagian terkecil dari seluruh struktur sosial yang lebih besar. Permasalahannya bukan terletak pada hasil liputan atau sang wartawan itu sendiri, melainkan struktur sosial di luar wartawan begitu kuat dalam mempengaruhi seluruh isi berita media massa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdullah, H. (2003). *Konflik Ideologi dalam perkembangan Tradisi Kliwonan Gunung Jati*. Bandung:PPs. Unpad
- Ananda Santoso dan A.R. Al Hanif. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hal. 127.
- Fiske, John.(1982). *Introduction of Communication Studies*. Routledge : London
- Haryatmoko. (2017). *Analisis Wacana Kritis*. Saufamedia : Jogjakarta
- Magnis-Suseno, Franz. (1992). *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Kanisius:Jogjakarta. Hal. 230-231
- Miriam Budiarto. (2017). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya : Bandung. Hal.179-187
- Raymond Williams. (2015). *Televisi*. Resist Book : Yogyakarta. Hal.269
- Ruth Wodak (2005). *The Discourse of politics in Action : Politics as Usual*, New York : Edinburgh
- Rewansyah, Asmawi. (2015). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka goodGovernance*. Yusaintanas Prioma : Bandung. Hal. 21
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Jogjakarta. Hal.337
- Tamburaka, Apriadi. (2012). *Agenda Setting Media Massa* : Raja Grafindo Persada. Jakarta

Zakky. (2018, Mei 7). Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli dan Secara Umum. Jakarta, Indonesia: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-ideologi/>